

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tingginya pertumbuhan bisnis saat ini membuat persaingan antar perusahaan semakin tinggi dan kompleks. Terbukti dengan hadirnya 809 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) per tahun 2022 membuat setiap perusahaan saling berkompetisi dalam mencetak keuntungan yang sebesar-besarnya. Perusahaan dituntut untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik demi memperoleh konsumen serta investor yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan yaitu dalam proses pemberian modal (Widyatama & Wibowo, 2015). Dengan adanya modal yang masuk, perusahaan harus dapat mengelolanya dengan efektif dan efisien menggunakan sumber daya yang ada, sehingga diperoleh kinerja keuangan yang baik bagi perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis dalam melihat sejauh mana perusahaan telah menjalankan aktivitas keuangannya. Munawir (2010) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai bentuk prestasi atas hasil kerja perusahaan pada periode tertentu dan dituangkan dalam sebuah laporan keuangan. Pada laporan keuangan memuat informasi penting mengenai aset, kewajiban, modal, dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Hal tersebut sangat penting bagi pemangku kepentingan untuk melihat kondisi perusahaan yang sebenarnya melalui capaian kinerja keuangan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah perusahaan berhasil atau sebaliknya.

Faktor yang dapat mempengaruhi baik buruknya kinerja keuangan perusahaan salah satunya yaitu diterapkannya tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Cadbury Committee (1992), GCG merupakan cara atau langkah untuk mengarahkan dan mengontrol sebuah perusahaan. GCG memiliki peran yang sangat krusial pada sebuah perusahaan yang sedang berjalan. GCG menciptakan sistem yang mampu menjaga keseimbangan yang ada pada perusahaan termasuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, kesalahan

pengelolaan, dan meningkatkan kinerja keuangan yang maksimum melalui pemanfaatan aset perusahaan (Darmadji & Fakhruddin, 2012). GCG diharapkan menjadi sistem yang mampu membangkitkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal pada perusahaan dan mampu membawa perubahan yang besar bagi perusahaan yang menerapkannya dengan baik.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus kecurangan yang terjadi meskipun telah diterapkannya GCG seperti kasus yang terjadi baru-baru ini pada perusahaan ternama yaitu PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. PT Garuda Indonesia diketahui melakukan manipulasi yang dilakukan oleh dewan direksi dan dewan komisaris atas laporan keuangan perusahaan terkait pengakuan pendapatan. Perusahaan melakukan pengakuan pendapatan atas pembayaran yang akan diperoleh dalam kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain. Hal tersebut seharusnya belum dapat diakui karena perusahaan belum menerima pembayaran tersebut sehingga berdampak pada laporan laba rugi perusahaan tahun 2018. Atas hal tersebut, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang dan rekan akibat kelalaian dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan PT Garuda Indonesia.

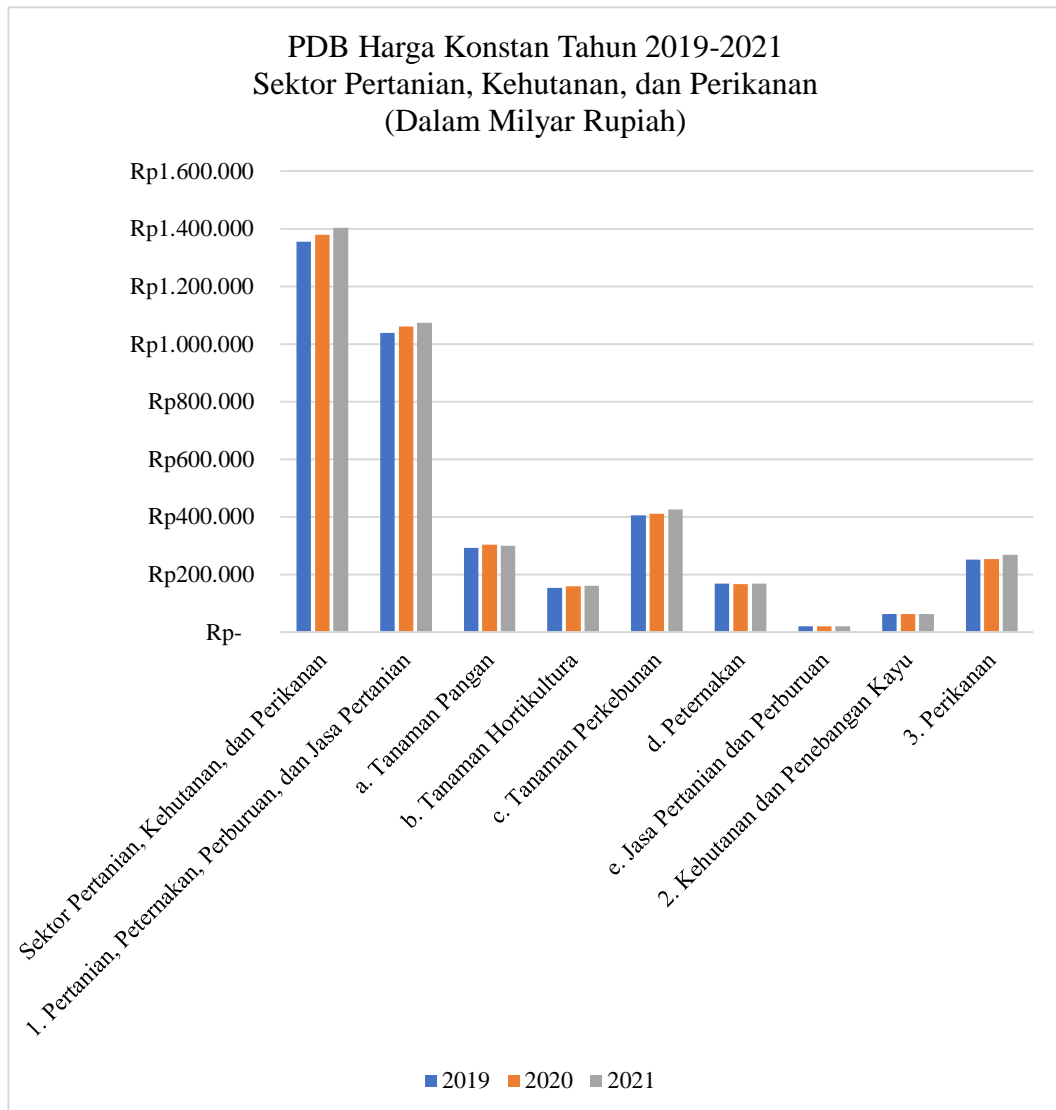
Dalam menjalankan GCG, perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Hal tersebut dimaksudkan agar perusahaan mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin kompleks. Penerapan GCG yang baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya dapat membantu perusahaan mencegah konflik kepentingan (*agency problem*) yang terjadi antara manajer dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain, GCG mengatur hubungan antara manajer dengan seluruh pemangku kepentingan atas perusahaan (Darmadji & Fakhruddin, 2012) dan menjadi sebuah konsep yang menitikberatkan pada pentingnya hak yang dimiliki oleh *stakeholder* untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, transparan, dan tepat waktu terkait kinerja keuangan perusahaan (Rahmawati & Kitrianti, 2021). Untuk dapat menjalankan GCG pada perusahaan, dibutuhkan mekanisme atau pihak-pihak yang dinilai penting seperti halnya komisaris independen dan juga komite audit.

Peranan komisaris independen, dinilai dapat menciptakan pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pengendalian perusahaan terutama mencegah terjadinya konflik kepentingan serta menjaga kepentingan para *stakeholder* (Zannati & Subiyanti, 2019). Sedangkan komite audit bertugas untuk menetapkan penerapan GCG dengan berfokus pada pelaporan keuangan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bekerja untuk kepentingan bersama (Rimardhani, Hidayat, & Dwiatmanto, 2016). Adanya komisaris independen dan komite audit, dapat memberikan gambaran atas prinsip-prinsip yang berlaku pada GGC yaitu *independency, transparency, accountability, responsibility, dan fairness* (Hasnati, 2014). Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen dan komite audit serta frekuensi rapat anggota dari komite audit yang dilakukan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan GCG dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Ukuran perusahaan juga dinilai sebagai indikator yang mampu melihat seberapa baik penerapan dan pelaksanaan GCG pada perusahaan, sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula bagi perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan akan memberikan pandangan tertentu terhadap sebagian investor mengenai tingkat profitabilitas yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Tisna & Agustami (2016), semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka perusahaan akan selalu berhati-hati dalam mengelola aset perusahaan yang dimiliki sehingga perusahaan dapat menciptakan kinerja keuangan yang baik di kemudian hari.

Pertanian termasuk salah satu sektor dengan pertumbuhan PDB terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), perolehan PDB harga konstan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2021 tercatat mencapai Rp1.403.710 miliar. Hadirnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap mengalami peningkatan dibandingkan dengan sektor lainnya. Salah satu sub sektor yang memiliki peran dalam mendorong peningkatan tersebut adalah perkebunan. Adapun grafik

perkembangan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2019-2021 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 1 PDB Harga Konstan Tahun 2019-2021 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki peran tertinggi dalam menciptakan perolehan PDB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Perkebunan memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi suatu negara dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga menyerap tenaga kerja yang banyak. Selain itu, sub sektor perkebunan memiliki kontribusi

dalam menyumbang devisa negara Indonesia. Hal tersebut didasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2020), melalui nilai ekspor tahun 2019 yang menunjukkan perolehan sebesar Rp359,14 triliun. Sehingga diperlukan perhatian khusus mengenai penerapan GCG dalam menciptakan perusahaan perkebunan yang lebih baik dan mencapai profitabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggunakan perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Supramono (2022) yang berjudul “*Good Corporate Governance and Financial Performance: Moderating Effect of Company Size*”. Penelitian tersebut menguji peranan GCG dengan menggunakan komisaris independen dan komite audit untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* serta menggunakan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Peneliti tertarik untuk menambahkan variabel rapat anggota komite audit, karena rapat komite audit merupakan bagian dari mekanisme GCG. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashari & Krismiaji (2020) yang menunjukkan bahwa rapat komite audit memiliki peran dalam mendeteksi kecurangan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hindasah, Supriyono, & Ningri (2021), serta Malik (2022) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Namun penelitian yang dilakukan oleh Aprila, Suryandari, & Susandya (2022) menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Muid (2017), menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Adapun penelitian yang menggunakan komite audit sebagai proksi dari GCG, seperti halnya yang dilakukan oleh Amelinda & Rachmawati (2021), menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian Putra & Nuzula (2017), bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji pengaruh peranan mekanisme GCG yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dan rapat komite audit sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan perusahaan yaitu menggunakan ROA sebagai variabel dependen. ROA dapat menggambarkan bagaimana pencapaian perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penggunaan aset, sehingga membantu investor dalam mengukur perolehan laba perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan mekanisme GCG dalam mempengaruhi pertumbuhan ROA perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap *Return on Asset* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan?
2. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan?
3. Apakah frekuensi rapat anggota komite audit berpengaruh terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara proporsi komisaris independen terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara jumlah anggota komite audit terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan?

6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara frekuensi rapat anggota komite audit terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan.
2. Untuk menguji pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan.
3. Untuk menguji pengaruh frekuensi rapat anggota komite audit terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan.
4. Untuk menguji ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara proporsi komisaris independen terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan.
5. Untuk menguji ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara jumlah anggota komite audit terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan.
6. Untuk menguji ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara frekuensi rapat anggota komite audit terhadap pertumbuhan *Return on Asset* perusahaan.

### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun kontribusi praktis. Adapun kontribusi teoritis dan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Kontribusi Teoritis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademisi dalam mengembangkan ilmu mengenai pengaruh mekanisme *Good*

*Corporate Governance* (GCG) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4.2. Kontribusi Praktis**

##### a. Bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan serta mengambil keputusan mengenai praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan.

##### b. Bagi pemangku kepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan termasuk investor dalam mengambil keputusan berinvestasi melalui penilaian kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA) perusahaan.

##### c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi terkait pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Return on Asset* (ROA) perusahaan.

#### **1.5. Gambaran Kontekstual**

Gambaran kontekstual dalam penyusunan penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut:

1. **BAB I: Pendahuluan**, bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian serta gambaran kontekstual.
2. **BAB II: Tinjauan Pustaka**, bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian-penelitian empiris terdahulu, dan kerangka konseptual serta hipotesis penelitian.



3. **BAB III: Metode Penelitian**, bab ini memuat tentang bentuk dan jenis penelitian, objek dan waktu penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, dan juga analisis data.
4. **BAB IV: Hasil dan Pembahasan**, bab ini memuat hasil dan pembahasan penelitian berdasarkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Hasil tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori dan metode penelitian yang digunakan.
5. **BAB V: Penutup**, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.